

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh sebab itu, pihak manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Yushita, 2010). Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau *principal* harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, *principal* sebagai pemberi amanah akan memberikan intensif pada manajemen berupa fasilitas baik finansial maupun non finansial (Yushita, 2010).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan (Lisa, 2012).

2.2. Laporan Keuangan

PSAK nomor 1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan (PSAK No. 1, 2018).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan medasarkan diri pada dua sumsi dasar, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha (Prastowo, 2015).

1. Dasar Akrual

Dengan dasar akrual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dengan dasar ini, laporan keuangan tidak hanya member informasi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, melainkan juga memberi informasi tentang kewajiban pembayaran kas dan sumber daya yang mewujudkan kas yang akan diterima di masa depan.

2. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan, yang berarti perusahaan akan tetap melanjutkan usahanya di masa depan. Ini berarti bahwa perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1, 2018) adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala informasi yang relevan dan andal tersebut adalah tepat waktu (*timeliness*). Suatu informasi akan kehilangan relevansinya jika terdapat keterlambatan yang tidak semestinya dalam pelaporan.

Pihak-pihak yang memerlukan informasi dalam laporan keuangan adalah (PSAK No. 1, 2018):

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat investor berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan. Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Karyawan juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama, pemasok dan kreditor usaha tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau pelanggan terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Pemerintah juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.3. Opini Audit

Auditor wajib merumuskan opini mengenai apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Untuk merumuskan opini, auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asumsi yang memadai atau wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, apakah

karena kecurangan atau kesalahan. Kesimpulan ini akan memperhitungkan (Tuanakotta, 2014):

1. Kesimpulan auditor, sesuai ISA 330, apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh.
2. Kesimpulan auditor, sesuai dengan ISA 450, apakah salah saji yang belum dikoreksi, secara terpisah atau tergabung, adalah material.
3. Evaluasi yang diwajibkan oleh alinea 12 – 15.

Auditor wajib mengevaluasi apakah laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan ketentuan atau persyaratan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Evaluasi ini harus meliputi pertimbangan mengenai aspek kualitatif dari praktik akuntansi entitas itu, termasuk indikator mengenai kemungkinan bias dalam pandangan dan pemikiran manajemen (Tuanakotta, 2014).

Secara khusus, auditor wajib mengevaluasi apakah dengan mempertimbangkan persyaratan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Tuanakotta, 2014):

1. Laporan keuangan cukup mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang dipilih dan diterapkan.
2. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan yang diterapkan adalah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan (memang) tepat.
3. Estimasi akuntansi yang dibuat manajemen adalah wajar.
4. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

5. Laporan keuangan memberikan cukup *disclosure* yang memungkinkan pemakai memahami dampak transaksi dan peristiwa yang material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan.
6. Terminologi dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan, sudah tepat.

Ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian yang wajar (*fair presentation framework*), evaluasi yang diwajibkan pada alinea 12 – 13 juga termasuk apakah keuangan memenuhi syarat penyajian yang wajar. Evaluasi auditor mengenai apakah laporan keuangan memenuhi syarat penyajian yang wajar akan meliputi pertimbangan mengenai (Tuanakotta, 2014):

1. Presentasi, struktur, dan isi secara keseluruhan dari laporan keuangan.
2. Apakah laporan keuangan, termasuk catatan (atas laporan keuangan), mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, dengan cara yang mencapai penyajian yang wajar.

Auditor wajib mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk atau menjelaskan dengan cukup, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor wajib memberikan opini tidak dimodifikasi (wajar tanpa pengecualian) ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Jika auditor (Tuanakotta, 2014):

1. Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material, atau

2. Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material.
3. Auditor wajib memodifikasi opini (artinya memberikan opini yang bukan wajar tanpa pengecualian) dalam laporan auditor sesuai dengan ISA 705.

Jika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian yang wajar, tidak mencapai penyajian yang wajar, auditor wajib membahas hal ini dengan manajemen dan, tergantung pada persyaratan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bagaimana masalah itu diselesaikan, auditor wajib menentukan apakah perlu memodifikasi opini dalam laporan auditor sesuai dengan ISA 705. Ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka kepatuhan (*compliance framework*), auditor tidak harus mengevaluasi apakah laporan keuangan mencapai penyajian yang wajar. Namun, jika dalam situasi yang sangat jarang, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan menyesatkan, auditor wajib membahas hal ini dengan manajemen dan, tergantung pada bagaimana masalah itu diselesaikan, auditor wajib menentukan apakah dan bagaimana mengkomunikasikannya dalam laporan keuangan (Tuanakotta, 2014).

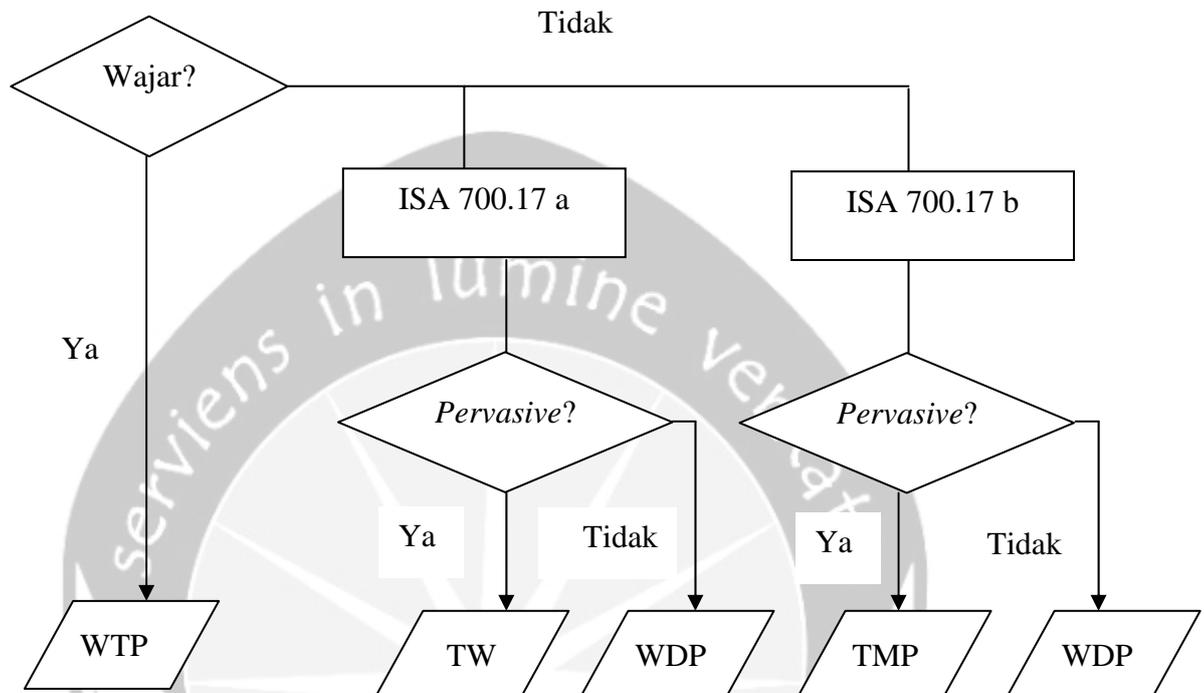
Berikut ini disajikan tabel mengenai pertimbangan dalam merumuskan opini (Tuanakotta, 2014):

Tabel 2.1
Pertimbangan dalam Merumuskan Opini

<p>Materialitas Simpulkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah materialitas masih tepat dalam konteks hasil keuangan entitas yang sebenarnya? • Apakah salah saji yang tidak dikoreksi (termasuk yang berasal dari periode yang lalu), secara terpisah atau tergabung, dapat menyebabkan salah saji yang material?
<p>Bukti Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh? • Apakah estimasi akuntansi yang dibuat manajemen sudah layak? • Apakah prosedur analitikal yang dilakukan pada atau mendekati akhir tahun menguatkan kesimpulan yang diambil selama audit?
<p>Kebijakan Akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah laporan keuangan cukup mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang dipilih dan diterapkan? • Apakah kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan adalah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan (memang) tepat?
<p>Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah laporan keuangan merujuk atau menjelaskan dengan cukup, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku? • Apakah semua pengungkapan dalam laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku? • Apakah terminologi dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan, sudah tepat? • Apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dipahami, dan cukup? • Apakah laporan keuangan memberikan cukup <i>disclosures</i> yang memungkinkan pemakai memahami dampak transaksi dan peristiwa yang material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan?
<p><i>Fair Presentation Frameworks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah presentasi, struktur, dan isi secara keseluruhan dari laporan keuangan termasuk catatan (atas laporan keuangan), mencerminkan dengan benar transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku? Jika tidak, apakah (auditor) perlu memberikan <i>disclosures</i> tambahan untuk memastikan tercapainya <i>fair presentation</i>? • Apakah laporan keuangan, sesudah memasukkan <i>adjustments</i> yang dibuat manajemen sebagai bagaimana dari proses audit proses, konsisten dengan pemahaman auditor mengenai entitas dan lingkungannya?
<p><i>Compliance Frameworks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah laporan keuangan menyesatkan?

Sumber: Tuanakotta, 2014

Bagan berikut ini merupakan bagan yang serupa dengan tabel 2.1 untuk kerangka pelaporan keuangan penyajian yang wajar (*fair presentation*).



Gambar 2.1

Kerangka Pelaporan Keuangan Penyajian yang Wajar

Sumber: Tuanakotta (2014)

Berikut ini adalah penjelasan mengenai perumusan opini auditor setelah melakukan audit laporan keuangan (Tuanakotta, 2014):

1. Dalam jajaran genjang pertama ada keputusan yang harus dibuat auditor sesudah mengevaluasi bukti-bukti audit yang diperoleh dan tidak diperolehnya. Keputusan ini, dalam bentuk sederhananya, menjawab pertanyaan “Wajar?”

2. Jika jawaban atas pertanyaan “Wajar?” adalah Ya, maka auditor merumuskan opini WTP (wajar tanpa pengecualian atau *unqualified opinion*). Jika jawabannya tidak maka auditor merumuskan modifikasi atas opini. Opini yang dimodifikasi adalah opini yang bukan WTP. Rinciannya tergantung pada fakta-fakta berikut.
3. Fakta pertama, auditor menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Referensinya adalah ISA 700.17a. Atau, fakta kedua, auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Referensinya adalah ISA 700.17b.
4. Pertanyaan kedua, ditunjukkan dengan dua jajaran genjang berisi pertanyaan: Pervasif? Pertanyaan ini ditujukan kepada fakta pertama dan kedua.
5. Jika fakta pertama tidak pervasif, auditor merumuskan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian atau *qualified opinion*).
6. Jika fakta kedua pervasif, auditor merumuskan opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat atau *disclaimer of opinion*). Jika fakta kedua tidak pervasif, auditor merumuskan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian atau *qualified opinion*).

Entitas dan manajemen mengharapakan auditor memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas laporan keuangan entitas. Namun, setelah melaksanakan dan menyelesaikan proses auditnya, auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat memberikan WTP, dan sesuai dengan ISAs ia harus memodifikasi

laporannya. Pendapat audit yang dimodifikasi (*modified audit opinion*) wajib diterbitkan manakala auditor menyimpulkan bahwa (Tuanakotta, 2014):

1. Berdasarkan bukti audit yang dikumpulkannya, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material, atau
2. Tidak mungkin memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material.

Ada tiga jenis pendapat audit yang dimodifikasi (*modified audit opinion*), yaitu (Tuanakotta, 2014):

1. Wajar Dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Ketika dampaknya tidak material dan tidak cukup pervasif untuk memberikan pendapat tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat.

Diterapkan dalam hal:

- a. Bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh, dan auditor menyimpulkan ada salah saji, sendiri-sendiri atau tergabung, yang material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau
 - b. Auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opininya. Auditor menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi atas laporan keuangan karena salah saji yang tidak ditemukan, bisa material tetapi tidak pervasif.
2. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Ketika dampaknya material dan pervasif. Diterapkan dalam hal bukti audit yang cukup dan tepat diperoleh, dan auditor menyimpulkan ada salah

saji, sendiri-sendiri atau tergabung, yang material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Ketika dampak yang mungkin terjadi atas laporan keuangan karena salah saji yang tidak ditemukan, bisa material dan pervasif. Diterapkan dalam hal auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opininya, dan ia menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi atas laporan keuangan karena salah saji yang tidak ditemukan, bisa material dan pervasif.

Ini juga diterapkan pada situasi yang sangat langka dimana tidak mungkin bagi auditor memberikan pendapat karena beberapa ketidakpastian yang bisa saling terkait dan dampak kumulatif dari ketidakpastian itu terhadap laporan keuangan. Hal ini diterapkan meskipun auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masing-masing ketidakpastian tersebut.

2.4. Opini Audit *Going Concern*

Penggunaan asumsi usaha berkesinambungan (*going concern assumption*) sangat fundamental dalam membuat laporan keuangan. ISA 570 memberikan petunjuk mengenai tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan berkenaan dengan penggunaan asumsi “usaha berkesinambungan” dan penilaian manajemen mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha berkesinambungan (Tuanakotta, 2014).

Dengan asumsi usaha berkesinambungan, suatu entitas umumnya dipandang sebagai usaha yang berkesinambungan untuk masa mendatang “di depan mata” tanpa niat melikuidasi entitas itu atau berhenti beroperasi, atau meminta perlindungan kreditur sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan (seperti undang-undang kepailitan). Oleh karena itu, aset dan kewajiban dicatat atas dasar entitas itu dapat merealisasi asetnya dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnisnya yang normal (Tuanakotta, 2014).

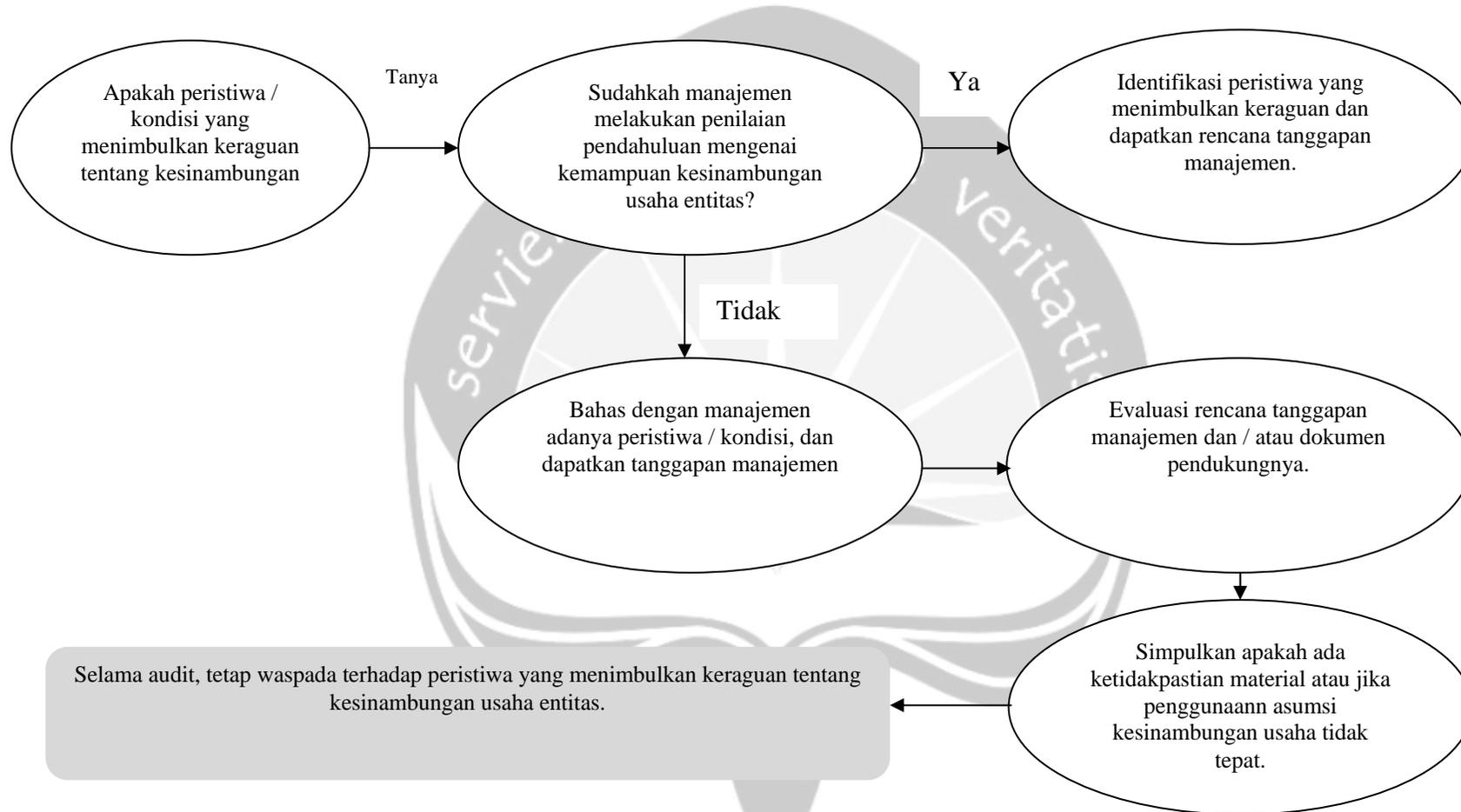
Ketika melaksanakan prosedur penilaian risiko sesuai ISA 315, auditor wajib mempertimbangkan apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Dalam melakukan hal itu, auditor wajib menentukan apakah manajemen sudah melaksanakan penilaian pendahuluan tentang kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan, dan:

1. Jika penilaian (pendahuluan) itu sudah dilaksanakan, auditor wajib membahas penilaian itu dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen sudah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi, yang masing-masing atau secara bersama, mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan dan, jika demikian, rencana manajemen untuk menangani masalah itu; atau
2. Jika penilaian (pendahuluan) itu belum dilaksanakan, auditor wajib membahas dengan manajemen dasar untuk rencana penggunaan asumsi usaha berkesinambungan, dan bertanya kepada manajemen apakah peristiwa atau kondisi, yang masing-masing atau secara bersama, mungkin

menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan.

Auditor wajib waspada selama auditnya, terhadap bukti audit mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Berikut ini merupakan bagan prosedur penilaian kesinambungan usaha entitas:





Gambar 2.2
Prosedur Penilaian Risiko - Kesinambungan Usaha Entitas
Sumber: Tuanakotta, 2014

Beberapa contoh peristiwa atau kondisi, yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, menimbulkan keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha (Tuanakotta, 2014).

1. Indikator Keuangan

- a. Posisi utang bersih (*net liability position*) atau utang lancar bersih (*net current liability position*).
- b. Pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa prospek yang realistis untuk perpanjangan atau pelunasan, atau ketergantungan yang besar akan pinjaman jangka pendek untuk membiayai aset tetap.
- c. Indikasi penarikan dukungan dari para kreditur.
- d. Arus kas operasional yang negatif seperti terlihat dalam laporan keuangan historis maupun prospektif.
- e. Rasio keuangan utama yang buruk.
- f. Kerugian operasional yang besar.
- g. Penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, secara signifikan.
- h. Menunggak membayar dividen atau bahkan menghentikan sama sekali.
- i. Ketidakmampuan membayar para kreditur pada tanggal jatuh temponya utang.
- j. Ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat pinjaman.
- k. Perubahan transaksi pembelian dari transaksi kredit ke tunai transaksi.

1. Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk mengembangkan produk baru atau investasi yang sangat penting.
2. Indikator Operasional
 - a. Niat atau rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi.
 - b. Hilangnya anggota (tim inti) manajemen, tanpa pengganti.
 - c. Kehilangan pasar yang sangat penting, pelanggan utama, *franchise*, *license*, atau pemasok utama.
 - d. Kesulitan dengan DSM, mogok kerja berkepanjangan, bentrokan dalam pabrik dan seterusnya.
 - e. Kekurangan pemasok untuk bahan baku atau mesin yang penting.
 - f. Munculnya saingan baru yang sangat sukses.
3. Lain-Lain
 - a. Ketidapatuhan mengenai kewajiban permodalan.
 - b. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau ketentuan statuter (anggaran dasar).
 - c. Perubahan undang-undang, ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak buruk bagi entitas.
 - d. Bencana besar yang tidak diasuransikan atau yang *underinsured* (asuransi terlalu rendah).

Auditor wajib mengevaluasi penilaian (oleh) manajemen tentang kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara kesinambungan. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen tentang kemampuan entitas melanjutkan

usahanya secara berkesinambungan, auditor wajib meliputi periode yang sama seperti yang digunakan manajemen dalam membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh undang-undang atau ketentuan perundang-undangan jika ketentuan itu menetapkan periode yang lebih panjang. Jika penilaian manajemen tentang kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan meliputi periode kurang dari 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan sebagaimana didefinisikan dalam ISA 560, auditor wajib meminta manajemen memperpanjang periode penilaiannya, setidaknya 12 bulan sejak tanggal tersebut (Tuanakotta, 2014).

Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor wajib mempertimbangkan apakah penilaian manajemen meliputi semua informasi yang relevan yang diketahui auditor sebagai hasil auditnya. Auditor wajib menanyakan manajemen mengenai pengetahuannya tentang peristiwa atau kondisi di luar periode yang diliput oleh penilaian manajemen, yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan (Tuanakotta, 2014).

Jika peristiwa atau kondisi sudah diidentifikasi dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, auditor wajib memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah ada ketidakpastian material, dengan melakukan prosedur audit tambahan, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur ini meliputi berikut ini (Tuanakotta, 2014):

1. Dalam hal manajemen belum melaksanakan penilaian mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, minta manajemen melakukan penilaian.
2. Evaluasi rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang sehubungan dengan penilaian mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, apakah hasil dari rencana ini mempunyai peluang untuk memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen memang *feasible* dalam keadaan atau situasi tersebut.
3. Dalam hal entitas sudah menyiapkan perkiraan arus kas, dan analisis perkiraan itu merupakan faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan *future outcome* dari peristiwa atau kondisi, dalam mengevaluasi rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang:
 - a. Evaluasi keandalan data yang disiapkan untuk dan mendasari perkiraan tersebut.
 - b. Tentukan apakah ada pendukung yang cukup untuk asumsi yang mendasari perkiraan tersebut.
4. Dalam hal entitas sudah menyiapkan perkiraan arus kas, dan analisis perkiraan itu merupakan faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan dampak di kemudian hari (*future outcome*) dari peristiwa atau kondisi, dalam mengevaluasi rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang:
 - a. Evaluasi keandalan data yang disiapkan untuk dan mendasari perkiraan tersebut.

- b. Tentukan apakah ada pendukung yang cukup untuk asumsi yang mendasari perkiraan tersebut.
5. Pertimbangkan apakah fakta atau informasi tambahan tersedia, sejak tanggal manajemen melaksanakan penilaian.
6. Minta representasi tertulis dari manajemen dan, jika perlu dari TCWG (*those charged with governance*), tentang rencana mereka untuk tindakan di masa mendatang dan tentang *feasibility* dari rencana tersebut.

Rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang, mengenai masalah kesinambungan usaha umumnya membahas satu atau beberapa strategi tentang (Tuanakotta, 2014):

1. Melikuidasi (menjual) aset.
2. Meminjam uang atau merestrukturisasi utang.
3. Mengurangi atau menunda pengeluaran.
4. Merestrukturisasi operasi, termasuk produk dan jasa.
5. Mengupayakan *merger* atau akuisisi.
6. Meningkatkan modal.

Berikut ini langkah-langkah yang diambil auditor dalam menangani masalah kesinambungan usaha (Tuanakotta, 2014):

1. Dapatkan penilaian dan rencana manajemen

Jika auditor belum memperolehnya, minta manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.

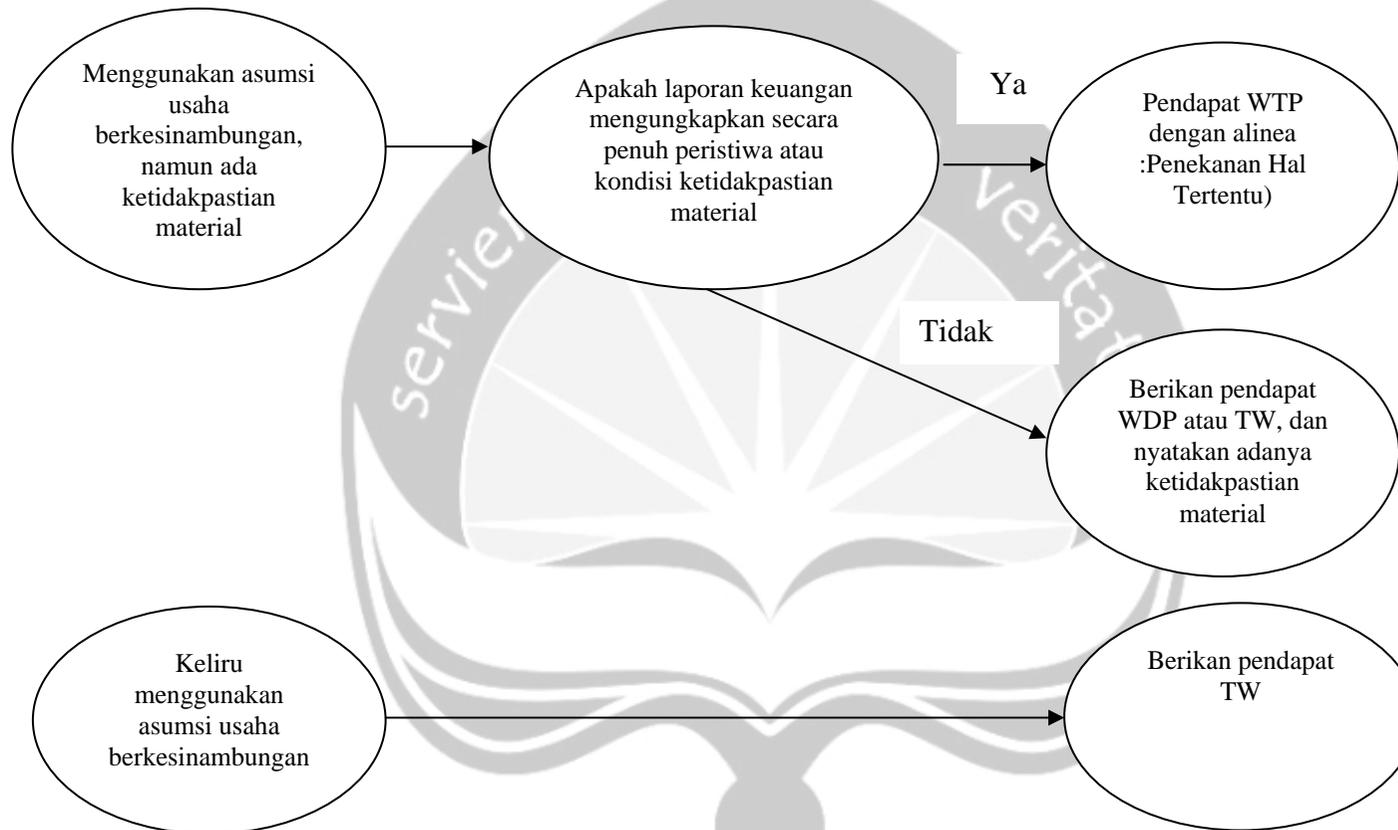
2. Evaluasi rencana manajemen

- a. Evaluasi rencana manajemen untuk menanggapi penilaian terhadap kesinambungan usaha.
- b. Apakah *outcome* dari rencana tersebut dapat memperbaiki keadaan.
- c. Apakah rencana tersebut *feasible* dalam situasi yang dihadapi.
- d. Berapa andalnya perkiraan laba atau arus kas, dan hal apa yang mendukung asumsi yang digunakan.
- e. Identifikasi, bahas, dan peroleh bukti mengenai faktor lain yang mungkin berdampak terhadap kemampuan kesinambungan usaha entitas, seperti:
 - 1) Hasil operasi terakhir, buruk atau sangat buruk.
 - 2) Pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
 - 3) Kesulitan keuangan yang diungkapkan dalam pertemuan pimpinan entitas, dan terekam dalam risalah rapat.
 - 4) Adanya litigasi atau tuntutan hukum dan taksiran mengenai implikasi keuangannya.
 - 5) Ada atau tidaknya, sah atau tidaknya, dan dapat dipaksakan atau tidaknya pengaturan yang memberikan atau mempertahankan dukungan keuangan dai pihak terkait dan pihak ketiga.
 - 6) Kemampuan keuangan pihak terkait dan pihak ketiga untuk penilaian tambahan atau pemberian jaminan.
 - 7) Peristiwa kemudian lainnya.

- 8) Indikasi kecurangan seperti transaksi fiktif atau menyembunyian fakta penting yang material.
- f. Masih berlanjutnya (tidak diakhirinya) fasilitas pinjaman dan dengan syarat yang sama.
 - g. Laporan mengenai tindakan atau sanksi dijatuhkannya regulator.
 - h. Dalam hal penjualan aset, apakah ada dukungan yang cukup? Ada (calon) pembeli?
 - i. Juga pertimbangkan apakah fakta atau informasi tambahan tersedia, sejak tanggal manajemen melaksanakan penilaian.
3. Minta representasi tertulis

Minta representasi tertulis dari manajemen dan, jika perlu, dai TCWG (*those charged with governance*), tentang rencana mereka untuk tindakan di masa mendatang dan tentang *feasibility* dari rencana tersebut.

Langkah terakhir adalah melaporkan kesimpulan. Berikut ini gambar kesimpulan auditor dan kewajiban pelaporan mengenai kesinambungan usaha.



Gambar 2.3
Kesimpulan Auditor dan Pelaporan Mengenai Kesenambungan Usaha
Sumber: Tuanakotta, 2014

2.5. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas difokuskan pada angka-angka yang ada di laporan laba-rugi, sehingga pengujian terhadap pemanfaatan atau penggunaan aset meliputi angka-angka pada neraca dan laporan laba-rugi (Munawir, 2008).

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on assets*. *Return on assets* mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aset) yang dimilikinya (Prastowo, 2015).

2.6. Likuiditas

Kreditor jangka pendek lebih memperhatikan prospek perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Kreditor ini lebih tertarik pada aliran kas dan manajemen modal kerja dibandingkan besar laba akuntansi yang dilaporkan perusahaan. Dengan demikian, kreditor jangka pendek lebih tertarik pada likuiditas perusahaan (Prastowo, 2015).

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan adalah *current ratio*. *Current ratio* memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya atau

utang lancarnya. Jika utang lancar melebihi aset lancarnya berarti perusahaan tidak akan mampu membayar tagihan utangnya (Munawir, 2008). *Current ratio* 200% pada umumnya sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada beberapa faktor. Suatu standar atas rasio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh perusahaan. *Current ratio* 200% hanya merupakan kebiasaan (*rule of thumb*) dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa yang lebih lanjut (Munawir, 2008).

2.7. Solvabilitas

Solvabilitas juga sering disebut dengan *leverage*. Salah satu rasio *leverage* adalah *debt to total assets*. Rasio ini merupakan perbandingan antara total utang dengan total aset (Munawir, 2008). *Debt to total assets* adalah perbandingan antara total utang perusahaan dengan total aktiva, yang mengindikasikan persentase dari total aktiva yang dibiayai dari kreditor, dan hal tersebut akan membantu dalam menentukan seberapa jauh kreditor terlindungi jika terjadi insolvansi pada perusahaan tersebut. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio tersebut semakin baik posisi perusahaan. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan debt ratio adalah berkaitan dengan utang lancar, dimasukkan dalam perhitungan atau tidak, jika dimasukkan dalam perhitungan hasilnya lebih konservatif (Munawir, 2008). Rumus perhitungan *debt to total assets* adalah (Riyanto, 2001):

$$Debt\ to\ total\ assets = \frac{Liabilitas\ Lancar + Liabilitas\ Jangka\ Panjang}{Total\ Aset}$$

2.8. Pertumbuhan Perusahaan

Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan yang baik dapat dilihat dengan penambahan pendapatan atau *revenue* per tahunnya. Penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberi peluang *auditee* untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan *auditee*, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern* (Krissindiastruti dan Rasmini, 2016).

Ardika dan Ekayani (2013) juga menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan posisi ekonominya sehingga lebih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*). Penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberi peluang entitas untuk memperoleh peningkatan laba. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang negatif mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan. Jadi, semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*.

2.9. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Vivi Angel dan Farid Addy Sumantri (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2017	Variabel dependen: Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> Variabel Independen: - Profitabilitas - Solvabilitas - Pertumbuhan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>, semakin rendah profitabilitas perusahaan maka penerimaan opini audit <i>going concern</i> akan mengalami peningkatan. - Solvabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>, semakin tinggi solvabilitas perusahaan maka perusahaan berkemungkinan untuk mendapatkan opini audit <i>going concern</i> dari auditor. - Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
2	Diah Rahmawati, Endang Dwi Wahyuningsih dan Ira Setiawati (2018)	Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Variabel dependen: Opini Audit <i>Going Concern</i> Variabel Independen: - Likuiditas - Ukuran Perusahaan - Pertumbuhan Perusahaan - Opini Audit Tahun Sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas tidak berpengaruh terhadap audit <i>going concern</i>. - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit <i>going concern</i>. - Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap audit <i>going concern</i>. - Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap audit <i>going concern</i>.
3	Julian Maradina (2019)	Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Opini <i>Going Concern</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Variabel dependen: Opini Audit <i>Going Concern</i> Variabel Independen: - Likuiditas - Profitabilitas - Solvabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i>. - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i>. - Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit <i>going concern</i>.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4	M. Fitriani dan Antung Noor Asiah (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Variabel dependen: Opini Audit <i>Going Concern</i> Variabel Independen: - Profitabilitas - Likuiditas - Ukuran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i>. - Likuiditas berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i>, semakin rendah tingkat likuiditas maka semakin besar pula kemungkinan menerima opini audit <i>going concern</i> terhadap perusahaan. - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i>.
5	Christian Lie, Rr. Puruwita Wardani dan Toto Warsoko Pikir (2016)	Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Rencana Manajemen terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i> (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI)	Variabel dependen: Opini Audit <i>Going Concern</i> Variabel Independen: - Likuiditas - Solvabilitas - Profitabilitas - Rencana Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>. - Solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>. - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>. - Rencana manajemen berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>.

2.10. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2010 dalam Fitriani dan Asiah, 2018). Semakin rendah profitabilitas perusahaan maka menunjukkan buruknya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Hal ini akan meningkatkan kecenderungan auditor memberikan opini audit *going concern*. Perusahaan dengan profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu mengelola aset secara efektif dan efisien. Adanya kondisi tersebut auditor berkemungkinan mengeluarkan opini audit *going concern*, karena auditor beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah cenderung memiliki laba yang relatif rendah sehingga perusahaan dianggap menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Angel dan Sumantri, 2018).

Rasio profitabilitas sebuah perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan *return on assets* (ROA). Dalam hubungannya dengan opini audit *going concern*, semua perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan laba dengan semua sumber daya yang dimiliki, dimana nantinya laba yang dihasilkan akan digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Semakin rendah profitabilitas sebuah perusahaan, maka

semakin rendah juga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga akan menyebabkan keraguan auditor atas kelangsungan usaha perusahaan, sebaliknya, jika profitabilitas perusahaan tinggi, berarti semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga tidak akan muncul keraguan akan kelangsungan usaha dari perusahaan tersebut (Lie dkk, 20016).

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Angel dan Sumantri (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian yang dilakukan Arma (2013) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit *going concern*.

2. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio *debt to total assets*. Hubungan solvabilitas dengan opini audit *going concern* adalah bahwa semakin tinggi rasio solvabilitas sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula aset perusahaan yang dibiayai dengan utang dari kreditur. Solvabilitas yang tinggi akan dapat meningkatkan risiko perusahaan, terutama dalam hal pembayaran utang dan bunga. Perusahaan yang memiliki utang yang tinggi

akan cenderung mengalami kesulitan keuangan. Hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan keraguan dari auditor atas kemampuan *going concern* perusahaan. Sebaliknya, apabila solvabilitas sebuah perusahaan rendah, maka semakin rendah juga risiko dalam hal pembayaran utang dan bunga yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga tidak akan membuat auditor ragu atas kelangsungan hidup perusahaan (Lie dkk, 2016).

Rudyawan dan Badera (2009) juga menyatakan bahwa rasio solvabilitas yang tinggi dapat berdampak buruk bagi kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit *going concern*.

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Angel dan Sumantri (2018) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian Lie dkk (2016) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₂: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit *going concern*.

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar (Prastowo, 2015). Semakin rendah tingkat likuiditas suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan tersebut untuk membayar para krediturnya tidak bisa terpenuhi. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi liabilitas jangka pendeknya maka hal tersebut dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap bahwa perusahaan sedang berada dalam masalah dan akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya, sehingga para auditor mengeluarkan opini audit *going concern* terhadap perusahaan tersebut (Fitriani dan Asiah, 2018).

Haryanto dan Sudarno (2019) juga menyatakan bahwa semakin banyaknya ketersediaan aset lancar maka kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lebih tinggi. Jika kemampuan untuk membayar dan melunasi utang perusahaan tinggi maka auditor pun menilai bahwa kondisi keuangan perusahaan sehat karena dapat melangsungkan aktivitas-aktivitas lain tidak terbebani dengan pelunasan utang perusahaan. Hasil penelitian Fitriani dan Asiah (2018) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, semakin besar tingkat likuiditas maka semakin besar pula kemungkinan untuk tidak menerima opini audit *going concern* terhadap perusahaan. Hasil penelitian Haryanto dan Sudarno (2019) juga menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini

audit *going concern*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₃: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit *going concern*.

4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern

Pertumbuhan perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan (Sofyan 2015 dalam Ariska dkk, 2019). Pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio pertumbuhan penjualan (Kartika, 2012). Perusahaan dengan pertumbuhan baik akan mampu meningkatkan volume penjualannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Meriani dan Krisnadewi, 2017).

Penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan peluang *auditee* untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan *auditee*, akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern* (Kartika, 2012). Meriani dan Krisnadewi (2017) juga menyatakan bahwa rasio pertumbuhan penjualan yang positif menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya sehingga memberikan peluang kepada perusahaan dalam meningkatkan laba dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Ginting dan Tarihoran (2017) juga menunjukkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Kartika (2012) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Perusahaan yang mempunyai rasio pertumbuhan penjualan yang negatif mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat mempertahankan posisi ekonominya dan kemungkinan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga auditor cenderung memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₄: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit *going concern*.

5. Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Pemberian Opini Audit *Going Concern*

Praptitorini dan Januarti (2011) menyatakan bahwa opini audit *going concern* yang diterima tahun sebelumnya akan mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini *going concern*, maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini yang sama pada

tahun berjalan. Kesulitan keuangan pada perusahaan yang menerima opini audit *going concern* akan semakin parah apabila tidak ada tindakan perbaikan yang baik dan efektif sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan (Ardika dan Ekayani, 2013).

Ginting dan Tarihoran (2017) juga menyatakan bahwa penerimaan pernyataan *going concern* pada tahun sebelumnya dapat memberikan pengaruh kepada perusahaan bersangkutan untuk kembali menerima pernyataan sejenis pada tahun berikutnya. Hal ini bisa terjadi apabila kondisi perusahaan tidak membaik dari tahun sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018) memperoleh hasil opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap audit *going concern*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H₅: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit *going concern*.